

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP OPTIMALISASI
PENGAWASAN PERIZINAN REKLAME DI KABUPATEN GRESIK
MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME**

SKRIPSI

Oleh

Yusi Putri Vadia

NIM. C74218063



Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Jurusan Hukum Publik Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusi Putri Vadia

Nim : C74218063

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara
(siyasah)

Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Optimalisi Perizinan
Reklame Di Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Bupati Nomor 9
Tahun 2016 Tentang Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Yusi Putri Vadia

NIM. C74218063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Yusi Putri Vadia NIM. C74218067 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 9 Juni 2022

Pembimbing,



Drs. Achmad Yasin, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yusi Putri Vadia, NIM C74218063 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin 11 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Stara Satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji II

Drs. H. Sumarkan, M. Ag
NIP. 196408101993031002

Penguji III

Dr. Muhammad Hatta, S.Ag, M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Zainatul Ilmiyah, M.H
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 11 Juli 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Dekan



Zainatul Ilmiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Siyāsah Dusturiyāh* Terhadap Optimalisasi Pengawasan Perizinan Reklame Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame”. Bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang: 1) Bagaimana Optimalisasi Pengawasan dan Perizinan Reklame di Kabupaten Gresik?, 2) Bagaimana Tinjauan *Siyāsah Dusturiyāh* terhadap Optimalisasi Pengawasan Perizinan Reklame di Kabupaten Gresik?.

Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola deduktif, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil telaah teks dan wawancara, kemudian penulis memberikan pemecahan persoalan dengan teori *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh* Peraturan Bupati Penyelenggaraan Reklame di Kota Gresik.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Optimalisasi Pengawasan Perizinan Reklame di wilayah Kota Gresik yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP dan yang tergabung dalam Tim Pokja penyelenggaraan Reklame. Pengawasan reklame yang dilakukan sudah cukup optimal dengan upaya-upaya, aksi dan kegiatan lainnya yang telah dilakukan instansi penyelenggara reklame di wilayah Kota Gresik. Tetapi ada beberapa yang belum maksimal seperti yang dijumpai dilapangan masih ada pelanggaran reklame yang mengganggu pejalan kaki di trotoar, jumlah pemasangan reklame yang terlalu banyak dan tidak sesuai dengan surat izin. Dari beberapa kasus diatas, dapat dikaji bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pokja penyelenggaraan Reklame masih kurang optimal. Jika hal ini terus dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan berdampak pada para pengguna jalan. Dalam perspektif *Siyāsah Dusturiyāh* dalam *Marsalah Mursalah*, tujuan disusunnya suatu peraturan atau perundang-undangan yaitu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang baik, haruslah penting mengutamakan kemslahatan bagi masyarakat. Terutama kewenangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Tim pokja yaitu tugasnya menangani pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame liar. Selain itu ditinjau dalam perspektif *Wilayātul Hisbāh* yang memiliki aspek penting dalam melakukan pengawasan yang sesuai syariat yang harus dijalankan oleh lembaga pengawasan.

Oleh sebab itu, maka disarankan agar Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta yang tergabung dalam Tim Pokja penyelenggaraan reklame dapat menjalin kerjasama dan koordinasi tim dengan cara meningkatkan penertiban dan melakukan upaya dengan memebrikan program kepada masyarakat terkait pentingnya mematuhi peraturan dalam perizinan, petingnya membayar pajak dan tata cara melakukan penyelenggaraan reklame yang benar sesuai peraturan yang berlaku, sehingga penyelenggaran reklame di wilayah Kabupaten Gresik dapat terpelihara dan berjalan dengan baik.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xError! Bookmark not defined.
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
H. Definisi Operasional.....	14
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TEORI <i>FIQH SIYASAH</i> TENTANG KONSEP <i>MASLAHAH MURSALAH</i> DAN <i>WILAYAH AL-HISBAH</i>.....	23
A. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	23
B. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	25
C. Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i>	26

D. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	30
E. Konsep al-Imarah dan Wilayah Al-Imarah	35
F. <i>Wilayah Al-Hisbah</i> dalam Pengawasan	43
1. Pengertian Wilayahul Al-Hisbah	43
2. Peran Wilayahul Hisbah	43
BAB III OPTIMALISASI PENGASAWAN PERIZINAN REKLAME DI	
KABUPATEN GRESIK MENURUT PERATURAN BUPATI NOMOR 9	
TAHUN 2016.....	
A. Pengertian Pengawasan dalam Perizinan Reklame	47
B. Pelaksanaan Perizinan Reklame di Kabupaten Gresik.....	57
C. Identitas Objek Penelitian.....	68
D. Upaya Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala di Kabupaten Gresik.....	73
BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYASAH DUSTURIYAH</i> TERHADAP	
OPTIMALISASI PENGAWASAN PERIZINAN REKLAME MENURUT	
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GRESIK NOMOR 9 TAHUN	
2016 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.....	
A. Analisis Optimalisasi Pengawasan Perizinan Reklame Menurut Peraturan Bupati 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame	85
B. Tinjauan Siyasaah dalam Fiqh Siyasaah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Perizinan Reklame Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame.....	89
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Agnesia M. “Studi Deskriptif Tentang Efektifitas Pengawasan Reklame di Kota Surabaya”, *Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 1 (Maret, 2020).
- Sirajun. *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, 2009.
- Noviansyah, Vivin Rahayu. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame”, Skripsi—Universitas Sumatra, Medan, 2011.
- Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
- Cahyadi, Amelia. “Pemisahan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Izin Reklame Sebagai Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak”, *Jurnal Pajak Daerah*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Adrian, Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Boediningsih, Widyawati. “Penegakan Hukum Terhadap penyelenggaraan Izin Reklame di Kota Surabaya”. *Jurnal Hukum*. Vol, 2 No 2, Surabaya, 2015.
- Rojak, Jeje Abdul, *Hukum Tata Negara Islam, Surabaya: UINSA PRESS*, 2014.
- Alwasim Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Iqbal, M, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Hananto, Dahlianto, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sampang”. *Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Surabaya, Indonesia, Vol 6, No. 2, 2019.
- I Gusti Nyoman, I Nyoman Suyatna, I Ketut Suardita, “Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar, Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, Vol. 4, No. 3, April, 2016.

- Hikmatuz, Asri, “Upaya Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk Terhadap Penyelenggaraan Reklame Tanpa Izin (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Nganjuk)”, Skripsi—Universitas Brawijaya, Malang, 2015.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Jakarta: Amzah, 2020).
- Amelia, Cahyadini. Pemisahan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Izin Reklame Sebagai Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak, *PJIH*, Vol. 4 No.1, 2017.
- Nur, Astika. “Pengawasan Pemasangan Papan Reklame di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Sosial Politik*, Pekanbaru, Vol. 5 No. 1, 2018.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyash*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UINSA PRESS, 2011.
- Dzajuli. *fiqh siyash: Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Praatama, 2001.
- Tim pengusun Texbook Sejarah dan Kebudayaan Islam. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1982.
- Abidin, Zainal. *Konsepsi Politik Dan Ideologi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Enayat, Hamid. *Reaksi Politik Sunni Syiah*, Bandung: Pustaka Setia, 1988.
- Andi, M, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Jakarta: Gaya Media, 1999, 9.
- Weni Gusdi Sari, Zainuddin. “Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum tata negara Islam”, *Jurnal ilmu syariah*, Vol. 2, Nomor 2, 2021.
- Abdullah, *Konsep Kepemimpinan dalam Islam*, Jakarta: Ummul Quran, 2016.

- Pulungan, Suyuti, *Prinsip-prinsip otonomi Daerah dalam pemerintahan negara islam*, Jakarta: raja Grafindo persada, 2009.
- Abdul Qadir Handuh Saiman, Kamil Hadi. “Peran Pengawasan Wilayahul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Selatan”. *Jurnal Syariat islam*. Vol. 3 No. 2, 2017.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Pahala, Mariot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Wijaya, Putut. “Pengerti Reklame Fungsi dan Jenis”, dalam <https://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-reklame-definisi-jenis-macam>, (10 Mei 2022).
- Sarwoto. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).
- Marbun, S. “Perpektif Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Penelitian Hukum* Vol.3 No.2 2013.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran)*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013).
- Satriya, Ari. “Optimalisasi pengawasan dalam Perizinan Reklame di Dinas Perizinan Kabupaten Sidoarjo “. Skripsi-UPN Veteran Jatim, Surabaya, 2018.
- Cahyadi, amalia. “Pemisahan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Izin Reklame Sebagai Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak PIJH”, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 4, 2018.
- Hananto, Dahliyanto. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Sampang”, *Jurnal Penelitian hukum*, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 6 No. 2, 2019.
- Lilik, Pudjiastutik, *Penataan dan Pengendalian Reklame melalui Mekanisme Perizinan*, (Surabaya: LPPM Unair, 2005)

Yasin, Achmad. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013).

Admin DPMPTSP. “Profil”, dalam <https://gresikkab.go.id/info/visi-misi>, (10 April 2022).

Admin DPMPTSP. “Tupoksi DPMPTSP”, dalam <https://dpmptsp.Kabgresik.go.id> (10 April 2022).

Admin Satpol PP. “Profil”, dalam <https://gresikkab.go.id/info/visi-misi>, (10 mei 2022)

Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad. *Sunan Ibn Majah Juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Gresik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A